

TERTIBKAN BALIHO BALON BUPATI

Satpol PP Tunggu Rekomendasi

BANTUL (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul belum bisa menertibkan keberadaan baliho yang ditengarai tidak berizin dari para kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul dalam Pilkada 2024.

Hingga kini, Satpol PP Bantul masih menunggu data dan rekomendasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. Sedangkan DPD Partai Golkar Kabupaten Bantul memang membolehkan balon bupati dan wakil bupati Bantul memasang baliho untuk mengenalkan diri. ”Kami dari Satpol PP masih menunggu data dan rekomendasi dari BPKPAD dan DPMTSP Kabupaten Bantul. Baliho tersebut berkaitan dengan izin dan juga pajak,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul, Jati Bayu Broto, Selasa (4/6).

Jati mengungkapkan, bahwa sejauh ini belum masuk tahapan kampanye Pilkada. Sehingga Satpol PP mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Bantul No 10 Tahun Tahun 2020 tentang perubahan alih Perda Bantul No 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. ”Artinya untuk penertiban, Satpol PP Bantul harus merujuk aturan dan prosedur. Sepekan sebelum pembongkaran, Satpol PP juga akan memberikan surat teguran. Ketika surat tidak ditanggapi oleh

pasang, Satpol PP bakal langsung melakukan pembongkaran,” jelasnya.

Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul, Trisna Manurung, menjelaskan untuk titik dan objek baliho tidak berizin sejauh ini masih dilakukan pendataan. Tapi pada 2023 lalu, pihaknya sudah memberikan rekomedasi untuk sejumlah titik, baliho harus ditiadakan.

”Di jembatan Srandakan ada dua titik, Ringroad Krapyak ada satu titik, perempatan Rejowinangun ada dua titik, Jalan Gedongkuning ada satu titik dan perempatan Gedongkuning ada satu titik. Sementara tahun 2024, terkait dengan yang belum bayar dan habis masanya, masih kami lakukan pendataan,” ujar Trisna.

Sedangkan Ketua DPD II Partai Golkar Bantul, Paidi SIP, mengakui pihaknya mempersilakan kandidat balon bupati dan wakil bupati Bantul yang mendaftar lewat Golkar memasang baliho di sejumlah titik di Bantul. Pemasangan baliho menjadi media untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Dengan harapan meningkat elektabilitas ketika survei dilakukan partai.

”Sejauh ini, ketika bakal calon, baik bupati dan wakil bupati memasang tentu sudah izin dan melibatkan vendor. Tapi terkait apakah keberadaan baliho mereka tidak berizin, kami tidak mengetahui,” jelas Paidi.

(Roy)-f

Tingkatkan Layanan, Kankemenag Monitoring KUA

WATES (KR) - Kankemenag Kulonprogo terus berupaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Terlebih pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan. Untuk itu dilakukan monitoring terhadap KUA.

”Kami maksimalkan upaya memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga diharapkan nantinya kita tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Jadikan ketugasan ini sebagai jalan rejeki bagi keluarga. Harus melaksanakan tugas ini dengan rasa senang. Di manapun ditempatkan terimalah dengan rasa ikhlas,” pesan Kasubbag TU Kankemenag Kulonprogo H Saeful Hadi SAg MPdI, di sela-sela moni-

toring KUA Wates, Temon, dan Panjatan, Senin (3/6).

Selain itu KUA diharapkan melakukan publikasi atas kegiatan yang dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

”KUA melalui Penyuluh Agama Islam juga harus lebih aktif lagi dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Hal ini dalam rangka menyiapkan generasi emas tahun 2045, yang merupakan program mandatori dilaksanakan bersama-sama. Diharapkan selalu update data yang diminta oleh Kementerian Agama, termasuk data kelompok binaan, dalam rangka pemetaan potensi penyuluh,” ujar Kasi Bimas Islam M Qomaruzzaman SAg MSI.

(Wid)-f



KR-Widiastuti

Pelaksanaan monitoring di KUA.

PASTIKAN KEAMANAN DAGING

Sleman Pantau Pemotongan Hewan Kurban

SLEMAN (KR) - Ketersediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) merupakan manifestasi konkret dari salah satu sasaran pembangunan di bidang keamanan pangan. Ketersediaan pangan yang ASUH dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat.

”Setiap tahun masyarakat di Kabupaten Sleman mengadakan penyembelihan hewan kurban yang mencapai ribuan ekor sapi, kambing, dan domba. Penyembelihan biasanya dilakukan oleh pengurus atau takmir masjid yang rata-rata belum berpengalaman dalam hygiene dan sanitasi pemotongan hewan,” ungkap Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa di sela memantau Pasar Hewan Ambarketawang Gamping, Selasa (4/6).

Terkait hal tersebut, Pemkab Sleman melalui DP3 Sleman dari tahun ke tahun selalu mengadakan kegiatan pemantauan. Hal itu sebagai upaya memberikan jaminan keamanan pangan utamanya daging kurban yang ada di masyarakat.

”Untuk kegiatan pemantauan pemotongan hewan kurban tahun 2024

Petugas Dinas Petugas Puskesmas dan Petugas Lapangan (PPL), dokter hewan praktik Kader Pengawas Pemotongan Hewan Kurban Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (Mandiri). Kemudian pendataan jumlah titik pemotongan hewan kurban, dan sosialisasi Puskesmas dengan petugas pemantauan hewan kurban di 17 lokasi,” beber Danang.

DP3 Sleman juga menyiapkan surat tugas kepada petugas pemantau dan pengawas hewan

kurban untuk pasar tiban (pemberian surat keterangan kesehatan hewan). Pelaksanaan pemantauan pemotongan hewan kurban dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah 1444 H atau tanggal 17, 18, dan 19 Juni 2024.

”Pada tahun 2023, data titik penjualan tercatat 359 titik dengan jumlah petugas pemantauan hewan kurban dari PNS 167 orang dan Non PNS 85 orang, sehingga total melibatkan 252 petugas,” pungkas Danang. (Has)-f



KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa saat memantau aktivitas Pasar Hewan Ambarketawang Gamping.

BUPATI H SUNARYANTA INGATKAN

Warganya Mewaspada Peredaran Narkoba

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta meminta masyarakat terutama generasi muda mewaspada peredaran narkoba dan tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan data dan catatan Polres Gunungkidul, selama tahun 2023 tercatat sebanyak 50 orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah tersebut keterlibatan kalangan muda berusia antara 18-25 tahun mendominasi dengan jumlah yang terlibat . sebanyak 30 orang.

Dari kasus tersebut, tahun lalu, Polres menyita seberat 4,5 gram narkoba, 380 butir psikotropika, dan obat-obatan terlarang sebanyak 6.248 butir. ”Kami meminta masyarakat proaktif dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan masyarakat,” katanya

Selain narkoba, pihaknya meminta agar kelompok jaga warga di wilayah menjadi garda terdepan mencegah berbagai gangguan kamtibmas dari kejahatan jalanan atau kenakalan remaja dan hal lain yang dapat memecah belah warga. Sebab itu, kelompok tersebut harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan lurah, perangkat kelurahan, dan petugas keamanan di wilayah masing-masing. Kelompok jaga warga juga memiliki payung hukum dalam bergerak yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 41/2023 tentang Jaga Warga dan Omah Jaga Warga.

Pada Pasal 10 ayat (1), kelompok jaga warga memiliki wewenang untuk mengundang pihak yang berkepentingan, meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan

dalam pengambilan keputusan, melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada. ”Kami berharap keberadaan jaga warga mampu mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kamtibmas,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan pihaknya baru saja mengukuhkan kelompok jaga warga di sejumlah Kelurahan . Adapun jumlah total kelompok itu di Gunungkidul mencapai 1.431 sesuai jumlah padukuhan. Saat ini masih ada sejumlah kelompok yang belum dikukuhkan. Kelompok jaga warga itu berperan membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik di masyarakat dan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

(Bmp)-f



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasmya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274) 868413, Fax (0274) 868413

KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

Radius Zonasi PPDB di Perkotaan dan Pedesaan Perlu Dibedakan



KR-Saifullah Nur Ichwan
M Arif Priyosusanto SSi

SLEMAN (KR) - Sekolah-sekolah sebentar lagi akan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Diharapkan pelaksanaan PPBD tahun ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya, utamanya komplain dari orang tua. Untuk itu Komisi D DPRD Kabupaten Sleman menyarankan jalur zonasi perlu dievaluasi, yakni membedakan antara radius zonasi PPDB di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Komisi D DPRD

Sleman M Arif Priyosusanto SSi mengatakan, untuk PPDB tahun kemarin, jalur zonasi radius berlaku bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius 0-200 meter dari SMP negeri wajib diterima. Hal itu berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB, bukan perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia aplikasi Maps yang ada di internet.

”Kami minta jarak radius perlu dievaluasi. Jarak radius PPDB di perkotaan dan pedesaan harus dibedakan, tidak boleh disamakan,” kata Arif, Selasa (4/6).

Menurut Arif, untuk jarak radius 200 meter di perkotaan tidak masalah karena padat penduduk. Namun jika di pedesaan, jarak 300 meter terkadang belum ada rumah penduduk. Kondisi geografis inilah yang perlu dipahami.

”Kalau di desa masih

banyak yang radius lebih dari 300 meter itu berupa sawah atau kebun. Sedangkan di kota, radius seratus meter saja sudah ’umpek-umpekan’ (padat). Misalnya saja di Cangkringan 600 meter belum tentu ada rumah. Tapi kalau di Depok, jelas sudah padat,” ucap politisi dari Fraksi Gerindra ini.

Revisi jarak radius itu untuk menghindari protes dari para

orang tua, khususnya yang berada di wilayah pedesaan. Padahal tujuan PPDB jalur zonasi ini bagian untuk pemerataan kualitas pendidikan. ”Komplain atau protes dari orang tua harus diminimalisasi dengan merevisi aturan. Harapannya nanti PPDB berjalan dengan baik,” ujar warga Maguwoharjo Depok Sleman ini.

Arif juga menyoroti fenome-

na pindah Kartu Keluarga (KK) demi bisa diterima di sekolah yang diidamkan siswa atau orang tua murid. Tidak sedikit orang tua siswa yang melakukan akal-akalan dengan menipiskan anaknya pada KK orang lain atau kerabat yang bersomisili di dekat sekolah tujuan.

”Titip KK itu harus diminimalisasi. Jangan sampai anak Sleman nggak bisa diterima

sekolah di daerah sendiri karena terisi oleh siswa dari luar Sleman. Sebaliknya kepala keluarga pada KK itu harus orang tua siswa yang bersangkutan,” pesan Arif.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sleman Muh Zuhdan SPd MAP. Dirinya mendorong calon siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin memanfaatkan secara maksimal fasilitas jalur afirmasi. Jalur ini khusus disediakan bagi calon siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas. Untuk syaratnya calon siswa harus terdata sebagai keluarga miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga miskin (KKM). ”Informasi dan sosialisasi terkait jalur ini masih sangat kurang sehingga kuota tidak maksimal,” kata anggota Fraksi PKS ini.

Dengan memanfaatkan jalur afirmasi secara maksimal



KR-Istimewa
Muh Zuhdan SPd MAP

ini, diharapkan anak-anak keluarga miskin dan rentan miskin dapat sekolah di SMP negeri terdekat. Sehingga tujuan pemerataan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

”Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin mendapatkan sekolah di SMPN negeri. Dengan memaksimalkan jalur afirmasi ini, diharapkan prestasi juga dapat merata,” pesan warga Rewulu Wetan Sidokarto Godean ini.

(Sni)-f



KR-Saifullah Nur Ichwan

Komisi D saat rapat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.